



Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
Banten

# LAPORAN

## MONITORING & EVALUASI

## CAPAIAN KINERJA

Triwulan I 2025



# 20 25



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN  
KEMENTERIAN HUKUM



---

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN  
TRIWULAN I TAHUN 2025**

**A. PENDAHULUAN**

**1. Umum**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaporkan hasil capaian kinerjanya Sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum masih mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 (Renstra 2020-2024). Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM secara tepat, terukur dan akuntabel, maka dibutuhkan komitmen dalam setiap pelaksanaan kinerja yang kemudian diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut berisi indikator kinerja yang menjadi alat bantu ukur mencapai sasaran strategis Kementerian Hukum. Disamping pengukuran terhadap indikator kinerja, dibutuhkan analisa terhadap optimalisasi penyerapan anggaran sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program untuk mencapai sasaran strategis Kementerian Hukum.

Sebagai Instansi Vertikal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten telah melaksanakan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Unit Eselon I dengan Kantor Wilayah Banten. Pencapaian target kinerja tersebut diukur

berdasarkan hasil analisa capaian Indikator Kinerja dan pelaksanaan kinerja anggaran pada 6 DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Triwulan I Tahun 2025 bertujuan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kinerja dan sebagai tindaklanjut untuk meningkatkan kinerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten.

## **3. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Triwulan I Tahun 2025 mencakup kepada hasil pelaksanaan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten dengan berfokus kepada :

1. Hasil Pelaksanaan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025; dan
2. Hasil Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025;
3. Hasil Capaian Nilai Kinerja Anggaran Triwulan I Tahun 2025

## **4. DASAR HUKUM**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum;
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

## B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja periode Triwulan I TA. 2025 di Kantor Wilayah Banten dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 April 2025  
Waktu : 09.00 WIB  
Tempat : Bale Soepomo Kantor Wilayah Banten

Selama periode Triwulan I tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mencapai target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja antara unit eselon 1 dengan Kantor Wilayah Banten. Namun, sebagai implikasi penerapan kebijakan Efisiensi Anggaran pada Kementerian dan Lembaga, berpengaruh kepada pencapaian kinerja organisasi baik Kementerian Hukum maupun Kantor Wilayah Banten sendiri. Dari total 15 indikator kinerja Kantor Wilayah Banten, hasil rata-rata capaian seluruh indikator kinerja Kantor Wilayah Banten sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2025 yaitu sebesar **54,66%** dengan capaian realisasi anggaran sebesar **15,86%**.



Perhitungan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten diukur dengan cara membandingkan antara target (rencana) yang telah ditetapkan dengan realisasi capaiannya. Realisasi capaian kinerja tersebut mengacu berdasarkan hasil capaian indikator kinerja kegiatan, realisasi anggaran dan nilai kinerja anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten. Hasil capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten periode Triwulan I Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

## 9. Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I TA. 2025

Realisasi anggaran periode Triwulan I Tahun 2025 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten mencapai **15,86%** atau sebesar **Rp. 5.120.764.263** dari total pagu sebesar **Rp 32.278.138.000,-**. Rincian realisasi anggaran periode Triwulan I Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

### Capaian Realisasi Anggaran Dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Triwulan I TA. 2025

| CAPAIAN KINERJA ANGGARAN TA. 2024 |                          |                       |                      |               |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| No                                | DIPA/Program             | Pagu                  | Realisasi            | %             |
| 1                                 | Dukungan Manajemen       | 23.932.963.000        | 4.841.272.263        | 20,23%        |
| 2                                 | Administrasi Hukum Umum  | 2.260.316.000         | 149.062.000          | 6,59%         |
| 3                                 | Kekayaan Intelektual     | 2.607.370.000         | 100.270.000          | 3,85%         |
| 4                                 | PP                       | 648.635.000           | 30.160.000           | 4,65%         |
| 5                                 | BPHN                     | 2.523.288.000         | -                    | 0,00%         |
| 6                                 | Badan Strategi Kebijakan | 305.566.000           | -                    | 0,00%         |
| <b>TOTAL</b>                      |                          | <b>32.278.138.000</b> | <b>5.120.764.263</b> | <b>15,86%</b> |

*\*Data diperbaharui tanggal 9 April 2025*

## 10. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I TA. 2025

Realisasi capaian indikator kinerja mengacu berdasarkan hasil capaian dari target indikator kinerja pada 6 Program/DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Banten sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Unit Eselon I dengan Kantor Wilayah Banten. Hasil capaian indikator kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten periode Triwulan I Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**  
**DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN**  
**TRIWULAN I TAHUN 2025**

| CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (PERJANJIAN KINERJA 2025) |                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                         |        |                   |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                           | DIPA/Program                   | Sasaran Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                              | Target | Capaian Indikator | %       | Capaian Program | Analisa Capaian                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>A KANTOR WILAYAH BANTEN</b>                               |                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                         |        |                   |         | -               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                            | <b>Dukungan Manajemen</b>      | Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum                   | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum                                                     | 100%   | 100%              | 100,00% | <b>100,00%</b>  | Berdasarkan hasil pemenuhan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKTRB) periode B03 pada Kanwil telah memenuhi RKTRB 100%                                                                                                                                      |
| 2                                                            | <b>Administrasi Hukum Umum</b> | Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah                                                             | Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah                                                                                                | 6%     | 4,20%             | 70,00%  | <b>70,00%</b>   | Berdasarkan data dari <a href="http://kanwil.ahu.go.id">kanwil.ahu.go.id</a> per tanggal 31 Maret 2025, diperoleh data PNPB sebesar Rp 44.519.500.000, maka diperoleh presentase kenaikan sebesar 4.2% dari perolehan PNPB pada tahun 2024 sebesar Rp 42.731.500.000 |
|                                                              |                                | Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah | Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan | 90%    | 40 %              | -       |                 | Berdasarkan data yang diperoleh dari Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dari 10 Pengaduan Masyarakat terhadap Notaris ke MPW, sudah ada 4 aduan yang ditangani oleh MPW, sedangkan 6 aduan masih dalam proses sidang MPW                                                |
| 3                                                            | <b>Kekayaan Intelektual</b>    | Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah                                                | Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah                                                                               | 30%    | 100%              | 120,00% | <b>120,00%</b>  | Hingga bulan Maret 2025 belum ada laporan atau aduan terkait pelanggaran Kekayaan Intelektual yang disampaikan kepada Kanwil Kemenkum Banten (nihil).                                                                                                                |
|                                                              |                                | Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan                                                        | Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah                                                                                     | 70%    | 100%              | 120,00% |                 | Kanwil Banten telah melaksanakan 3 kegiatan dengan total peserta yang mendapat edukasi terkait KI adalah 210 orang.<br>1) 2 kegiatan sosialisasi (RuKI) di kab pandeglang;<br>2) 1 kegiatan Pameran (Layanan KI) di CFD kota cilegon                                 |

|   |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |     |        |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                       | Intelektual di Wilayah                                                                                  | Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah                                   | 20% | 63,50% | 120,00% |               | Berdasarkan data dari DJKI total permohonan kekayaan intelektual dari Provinsi Banten berada di urutan ke-5 (lima) dengan perolehan sebesar 4.927 permohonan kekayaan intelektual secara global. Data pada dashboard monitoring DJKI, peningkatan permohonan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Banten pada Triwulan I tahun 2025 telah terealisasi sebesar 63,5% jika dibandingkan dengan permohonan Kekayaan Intelektual pada Triwulan I Tahun 2024.                                                                                                                                                          |
| 4 | <b>Peraturan Perundang-undangan</b>   | Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah                                                       | Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum | 80% | 30,00% | 37,50%  | <b>18,75%</b> | Jumlah Raperda dan Raperkada Yang telah di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Banten sebanyak 47 (15 Raperda dan 32 Raperkada) diantaranya:<br>1. Provinsi Banten : 0 Raperda dan 2 Rapergub;<br>2. Kota Tangerang : 2 Raperda dan 10 Raperwal;<br>3. Kabupaten Serang : 2 Raperda dan 3 Raperbup;<br>4. Kota Tangerang Selatan : 2 Raperda dan 12 Raperwal;<br>5. Kota Serang : 3 Raperda dan 3 Raperwal;<br>6. Kabupaten Tangerang : 2 Raperda dan 2 Raperbup;<br>7. Kota Cilegon : 0 Raperda dan 0 Raperbup;<br>8. Kabupaten Pandeglang :2 Raperda dan 0 Raperbup;<br>9. Kabupaten Lebak : 2 Raperda dan 0 Raperbup. |
|   |                                       | Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan                                           | Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan                | 12  | 0      | 0,00%   |               | Belum Melaksanakan Kegiatan Terkait Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 | <b>Badan Pembinaan Hukum Nasional</b> | Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah | Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan                                            | 1   | 0      | 0,00%   | <b>19,21%</b> | Belum menentukan Produk Hukum Daerah mana yang akan dijadikan objek Analisis dan Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |                                       |                                                                                                         | Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah                                                      | 1   | 1      | 100,00% |               | Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang P4GN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|   |                                 |                                                                         |                                                                                                                                             |     |        |        |              |                                                                                                                                                                                  |
|---|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                 | Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah                    | Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah                                                              | 82% | 12,50% | 15,24% |              | Melakukan Pembentukan/Penguatan Pojok JDIH di Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kelurahan Masigit dan Kelurahan kebondelaman Kota Cilegon                                     |
|   |                                 | Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah                           | Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi                           | 82% |        | 0,00%  |              | Menunggu revisi anggaran dari BPHN, sehingga pelaksanaan bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum belum dapat dilaksanakan                                                       |
|   |                                 |                                                                         | Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi                   | 80% |        | 0,00%  |              | Menunggu revisi anggaran dari BPHN, sehingga pelaksanaan bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum belum dapat dilaksanakan                                                       |
|   |                                 | Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah                                | Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah | 70% |        | 0,00%  |              | Menunggu petunjuk teknis dari BPHN                                                                                                                                               |
| 6 | <b>Badan Strategi Kebijakan</b> | Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah | Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti                                                             | 80% |        | 0,00%  | <b>0,00%</b> | Menunggu Juklak dan juknis dari BSK selaku Unit Eselon I serta adanya efisiensi terkait revisi anggaran , sehingga pelaksanaan Kegiatan yang ada di BSK belum dapat dilaksanakan |

### C. HASIL YANG DICAPAI

Hasil evaluasi berdasarkan data yang telah disampaikan diantaranya :

- Pada sisi realisasi anggaran, capaian realisasi anggaran Kantor Wilayah Banten pada Triwulan I 2025 *update* per tanggal 9 April 2025 belum tercapai optimal yaitu sebesar 15,86%. Hal ini disebabkan terdapat kebijakan efisiensi anggaran pada Kementerian dan Lembaga, sehingga sangat berdampak terhadap rendahnya realisasi anggaran Kantor Wilayah Banten pada periode Triwulan I tahun 2025.
- Pada sisi capaian indikator kinerja, dari total 15 indikator kinerja yang diemban oleh Kantor Wilayah Banten secara keseluruhan rata-rata capaian indikator kinerja hingga Triwulan I 2025 telah tercapai sebesar 54,66%. Namun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum optimal karena beberapa kegiatan mengalami penyesuaian sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran.

## D. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

Selama periode Triwulan I tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mencapai target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja antara unit eselon 1 dengan Kantor Wilayah Banten. Namun, sebagai implikasi penerapan kebijakan Efisiensi Anggaran pada Kementerian dan Lembaga, berpengaruh kepada pencapaian kinerja organisasi baik Kementerian Hukum maupun Kantor Wilayah Banten sendiri. Dari total 15 indikator kinerja Kantor Wilayah Banten, hasil rata-rata capaian seluruh indikator kinerja Kantor Wilayah Banten sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2025 yaitu sebesar **54,66%** dengan capaian realisasi anggaran sebesar **15,86%**.

### 2. Saran

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten akan melaksanakan evaluasi tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja Triwulan I TA. 2025 dalam rangka optimalisasi pencapaian kinerja di Lingkungan Kantor Wilayah Banten.

## E. PENUTUP

Demikian Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Periode Triwulan I Tahun 2025 ini disampaikan agar dapat ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan kinerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten.



Serang, 10 April 2025

Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum Banten



Ditandatangani secara elektronik oleh :

R. Natanegara K.P.